

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan mengenai pengelolaan keuangan pemerintah yang berupaya untuk mewujudkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas serta disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Trisaputra, 2013). Tak terkecuali desa yang saat ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah pusat yang mana terus berusaha dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional dengan harapan agar laju pembangunan di kota maupun desa semakin seimbang dan serasi. Terlebih lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang secara khusus membahas tentang Desa dimana Undang-Undang tersebut merupakan perluasan dari kewenangan (hak otonomi) yang terdapat pada desa dengan diberi kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Pemerintah desa merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa peningkatan keamanan, peningkatan kesehatan, peningkatan pembangunan, dan lain-lainnya, juga merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat sehingga pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung yang dalam hal ini berarti pemerintah desa merupakan tonggak utama dalam keberhasilan atas seluruh

program pemerintah yang telah disusun sebelumnya (Asrori, 2014). Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam setiap pembangunan dimana keduanya merupakan dua unsur terpenting dalam pembangunan desa untuk dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Seperti diketahui dalam otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam segala bentuk urusan tak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua bentuk baik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang ataupun uang yang menjadi milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa dengan baik serta mempertanggungjawabkan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut diantaranya: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Semesteran), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Tahunan), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir masa jabatan, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan, serta Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan) (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018). Laporan-laporan tersebut hendaknya mampu memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga segala informasi yang termuat didalamnya dapat menjadi salah satu bentuk transparansi oleh pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa untuk keperluan

perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan, juga bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Secara umum, tujuan dari laporan keuangan yang disusun merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi pemakai untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan. Jika dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah ke desa yang harus menyusun laporan keuangan sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan, jika dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kepala desa kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Beberapa manfaat dari pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa, mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan, serta untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Sektor Publik (IAI-KASP) pada tahun 2015 mengeluarkan pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa yang mana pedoman ini dapat membantu mempermudah pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa. Kemudahan pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa akan menciptakan pelaporan keuangan desa yang akuntabel

dan transparan sehingga peluang kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki nilai informasi yang berkualitas, karena informasi berkualitas yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Selain itu, keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan desa yang berkualitas sangat bergantung pada beberapa faktor dimana faktor-faktor tersebut antara lain terletak pada sumber daya manusia yakni kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelolanya. Penelitian yang dilakukan Ikasari (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya jika memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik, maka kualitas laporan akan meningkat sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sedangkan Andriani (2010) mengatakan dalam jurnalnya bahwasannya sumber daya manusia merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan dimana kualitas laporan keuangan akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung.

Akuntansi sebagai dasar pengelolaan keuangan desa memberikan acuan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin, maka diperlukan pemahaman akuntansi untuk dapat mengelola keuangan desa dengan baik yang mana rendahnya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliani, Nadirsyah, dan Bakar (2010) yang menyatakan bahwa penyebab rendahnya

kualitas laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri dan jika dilakukan peningkatan pemahaman akuntansi, maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat.

Dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karenanya untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan desa yang mana dalam hal ini dapat menghasilkan laporan keuangan secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Lisda, *et. al*, 2018). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2016 membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi tersebut adalah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dimana aplikasi ini memiliki peran penting dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan adanya aplikasi SISKEUDES adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, serta membantu pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa (Malahika, *et. al*, 2018).

Berdasarkan pada penuturan direktur PMPB Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara BPKP bahwasannya implementasi SISKEUDES di Jawa Timur pada tahun 2018 sudah mencapai pada angka 94,29% atau sebanyak 7.283 desa dari total keseluruhan desa yakni 7.724 desa di Jawa Timur sudah menggunakan SISKEUDES. Sehingga terlihat bahwa, penerapan aplikasi SISKEUDES di Jawa timur sudah hampir menyentuh angka sempurna yang artinya bahwa penerapan SISKEUDES di Jawa Timur dapat dikatakan hampir merata di semua desa (<https://sinergi.radarmalang.id/bpkp-evaluasi-siskeudes--radar-jember/>, 10 Agustus 2019).

Penelitian ini mengambil objek pada pemerintah desa di Kabupaten Sampang dimana Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Jawa Timur yang lebih tepatnya salah satu dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) dengan luas 1.233,30 km² yang terbagi atas 14 kecamatan dan 186 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS per 1 Juni 2018 sejumlah 968.520 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwasannya pada tahun 2018 seluruh desa di Kabupaten Sampang sudah menerapkan SISKEUDES dalam proses pengelolaan keuangan desa, pasalnya untuk dapat mencairkan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, pemerintah desa harus menginput data APBDes di SISKEUDES, ini merupakan salah satu syarat pencairan Dana Desa. Penerapan SISKEUDES di Kabupaten sampang dimulai pada tahun 2017 dengan melalui Bimbingan Teknis (bimtek) yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten sampang dan bekerjasama dengan Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur yang kemudian pada tahun selanjutnya pemerintah daerah secara serentak untuk merealisasikan pengaplikasian SISKEUDES dalam proses pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya, tingkat pengetahuan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala terbesar dalam proses pengaplikasian SISKEUDES di Kabupaten Sampang, tidak sedikit desa yang mengalami kesulitan dan belum bisa menyesuaikan diri dengan sistem baru.

Kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang masih berada pada tingkat paling rendah pada Indeks Pembangunan Manusia terendah se Jawa Timur dalam kurun waktu 8 tahun sejak 2010 sampai pada tahun 2018 menurut Badan Pusat Statistik. Data mengenai IPM se Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2010-2018

Kota/Kab	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pacitan	61,14	62,03	62,94	63,38	63,81	64,92	65,74	66,51	67,33
Ponorogo	64,13	65,28	66,16	67,03	67,40	68,16	68,93	69,26	69,91
Trenggalek	63,67	64,27	65,01	65,76	66,16	67,25	67,78	68,10	68,71
Tulungagung	67,28	67,76	68,29	69,30	69,49	70,07	70,82	71,24	71,99
Blitar	64,79	65,47	66,17	66,49	66,88	68,13	68,88	69,33	69,93
Kediri	66,24	66,84	67,29	68,01	68,44	68,91	69,87	70,47	71,07
Malang	63,47	63,97	64,71	65,20	65,59	66,63	67,51	68,47	69,40
Lumajang	59,62	60,72	61,31	61,87	62,33	63,02	63,74	64,23	64,83
Jember	59,94	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96	65,96
Banyuwangi	64,54	65,48	66,12	66,74	67,31	68,08	69,00	69,64	70,06
Bondowoso	59,47	60,46	62,24	63,21	63,43	63,95	64,52	64,75	65,27
Situbondo	60,07	60,82	62,23	63,43	63,91	64,53	65,08	65,68	66,42
Probolinggo	59,83	60,30	61,33	62,61	63,04	63,83	64,12	64,28	64,85
Pasuruan	60,79	61,43	62,31	63,74	64,35	65,04	65,71	66,69	67,41
Sidoarjo	73,75	74,48	75,14	76,39	76,78	77,43	78,17	78,70	79,50
Mojokerto	68,14	68,71	69,17	69,84	70,22	70,85	71,38	72,36	72,64
Jombang	66,20	66,84	67,82	68,63	69,07	69,59	70,03	70,88	71,86
Nganjuk	65,60	66,58	68,07	68,98	69,59	69,90	70,50	70,69	71,23
Madiun	64,87	65,98	67,32	68,07	68,60	69,39	69,67	70,27	71,23
Magetan	67,58	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94	72,60	72,91
Ngawi	64,52	65,84	66,72	67,25	67,78	68,32	68,96	69,27	69,91
Bojonegoro	62,19	63,22	64,20	64,85	65,27	66,17	66,73	67,28	67,85
Tuban	61,33	62,47	63,36	64,14	64,58	65,52	66,19	66,77	67,43
Lamongan	65,40	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84	70,34	71,11	71,97
Gresik	69,90	71,11	72,12	72,47	72,84	73,57	74,46	74,84	75,28
Bangkalan	57,23	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49	62,06	62,30	62,87

Sampang	54,49	55,17	55,78	56,45	56,98	58,18	59,09	59,90	61,00
Pamekasan	59,37	60,42	61,21	62,27	62,66	63,10	63,98	64,93	65,41
Sumenep	57,27	58,70	60,08	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28	65,25
Kota Kediri	72,20	72,93	73,66	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13	77,58
Kota Blitar	72,56	73,08	73,53	74,53	75,26	76,00	76,71	77,10	77,58
Kota Malang	76,69	77,36	78,04	78,44	78,96	80,05	80,46	80,65	80,89
Kota Probolinggo	67,30	68,14	68,93	70,05	70,49	71,01	71,50	72,09	72,53
Kota Pasuruan	69,69	70,41	72,01	72,89	73,23	73,78	74,11	74,39	74,78
Kota Mojokerto	72,78	73,47	74,20	74,91	75,04	75,54	76,38	76,77	77,14
Kota Madiun	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13	80,33
Kota Surabaya	77,20	77,62	78,05	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07	81,74
Kota Batu	68,66	69,76	70,62	71,55	71,89	72,62	73,57	74,26	75,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan data BPS Jawa Timur pada tahun 2018 diketahui bahwasannya Kabupaten Sampang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang paling rendah yakni sebesar 61,00%, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor dimana tingkat rata-rata lama belajar masyarakat yang masih rendah yakni 3,8% serta masih tingginya angka buta huruf di Kabupaten Sampang. Kondisi tersebut tentunya menjadi kendala terbesar dalam kelancaran pengelolaan keuangan desa, mengingat sumber daya manusia merupakan pelaksana atas proses pengelolaan keuangan desa dimana baik buruknya kualitas laporan yang dihasilkan bergantung pada kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki. Selain rendahnya sumber daya manusia sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, pengetahuan atau pemahaman mengenai proses pengelolaan keuangan desa juga menjadi faktor penting selanjutnya, dimana dapat diketahui bahwasannya mayoritas masyarakat bahkan para perangkat desa mengenyam pendidikan sampai pada tingkat menengah atas (SMA) yang artinya bahwa pengetahuan atau pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan kurang, terlebih saat ini dalam proses pengelolaannya sudah menggunakan sistem dimana dalam hal ini juga dibutuhkan sumber daya manusia yang memang secara latar belakang pendidikan sesuai dengan keahliannya agar penerapan SISKEUDES dapat

dilakukan secara maksimal yang nantinya akan berdampak pada kualitas laporan yang dihasilkan menjadi lebih baik serta peluang keberhasilan pembangunan desa semakin besar pula.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam kurun waktu 7 tahun berturut turut dari tahun 2011-2017 terakhir audit BPK terhadap pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, sedangkan pada tahun 2018 untuk pertama kalinya Kabupaten Sampang memperoleh hasil opini wajar tanpa pengecualian, namun berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD TA 2018, BPK masih menemukan adanya kelemahan terhadap peraturan prunang-undangan, permasalahan tersebut salah satunya mengenai pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 belum sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (<https://surabaya.bpk.go.id/?p=24693>, diakses pada 29 November 2019). Dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Sampang masih kurang bisa dipertanggungjawabkan, hal tersebut dapat juga berlaku pada lini kecil turunannya yaitu proses pengelolaan keuangan serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari setiap pemerintah desa di Kabupaten Sampang.

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan desa merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, pasalnya pada kenyataannya dalam laporan keuangan pemerintah desa masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Alokasi Dana Desa setiap tahunnya disalurkan pemerintah guna untuk menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur

desa. Namun, penggunaan dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal untuk menambah pundi-pundi kekayaan pribadinya. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Kepala Desa Sokobanah diduga melakukan tindak ketidakjujuran dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 589.246.000.

Salah satu warga Desa Sokobanah mengatakan bahwa Kepala Desanya yaitu Jatem ketika melakukan pembangunan desa dengan dana desa di rasa kurang mensejahterakan masyarakat. Pasalnya, pembangunan saluran irigasi pertanian di Dusun Lebak, Desa Sokobanah diduga tumpang tindih serta pengerjaannya diduga asal-asalan karena hanya dalam hitungan bulan, sebagian proyek yang telah dikerjakan sudah mengalami kerusakan. (<https://www.google.com/amp/s/madura.tribunnews.com/amp/2019/09/16.ada-dugaan-korupsi-warga-desa-sokobanah-daya-sampang-pastikan-kasus-korupsi-didesanya>, diakses 29 November 2019).

Penelitian Ikasari (2017) dengan penelitian yang berjudul pengaruh sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan rumah sakit umum daerah Kabupaten Boyolali menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan juga kompetensi sumber daya manusia.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Aniftahudin (2016) mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman

akuntansi, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian terkait variabel pemahaman akuntansi tersebut juga sesuai dengan penelitian Purwanti dan Wasman (2014) dimana variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti pemahaman akuntansi berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas laporan keuangan dimana sumber daya manusia yang berkompeten dalam pemahaman akuntansi dapat menciptakan laporan keuangan yang akurat dan bisa menggambarkan kondisi keuangan pada suatu instansi pemerintahan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lisda, Lizza, dan Lisna (2018) dengan variabel independen yang berbeda dimana penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh implementasi SIMDA desa, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selanjutnya penelitian serupa pada variabel kompetensi sumber daya manusia juga dilakukan oleh Ikasari, *et. al* (2017) dimana variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik, dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan, jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Selanjutnya Juardi (2018) meneliti tentang evaluasi penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa mengungkapkan bahwa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES, kualitas akuntabilitas keuangan desa sangat membawa perubahan yang baik dimana lebih mudahnya dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Penelitian serupa mengenai SISKEUDES juga dilakukan oleh Puspasari dan Dendi Purnama (2018) dengan judul implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kuallitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan menghasilkan bahwa variabel implementasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa dimana pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang mana semakin baik manajemen dalam memanfaatkan teknologi informasi maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi akan memberikan kemudahan terhadap pemerintah desa dalam melakukan pelaporan maupun pertanggung jawaban publik sebagai bentuk asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil variabel yang berbeda terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dimana penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh dari kualitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, dan implementasi SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. dalam penelitian ini, ketiga variabel tersebut akan fokus pada lingkup yang lebih

kecil berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lingkupnya di tingkat kabupaten ataupun provinsi, untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam faktor-faktor tersebut pada tingkat pemerintah desa. Mengingat saat ini pemerintah desa sudah diberi wewenang untuk melaksanakan tata pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunannya sendiri. Sehingga dapat diketahui apakah faktor-faktor tersebut dapat mendukung terciptanya pelaporan keuangan desa yang berkualitas. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen dimana penelitian ini langsung terfokus pada implementasi SISKEUDES sebagai bentuk pemanfaatan teknologi.

Variabel ini diteliti karena melihat pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini, maka sudah seharusnya pelaporan keuangan desa memanfaatkan teknologi informasi yang lebih modern. Namun pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia seringkali belum dilakukan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala yang salah satunya adalah rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga perlu diteliti apakah desa sudah mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES dengan baik. Ketiga faktor yang akan diambil dalam penelitian ini dimana dalam pengelolaan pelaporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten yang tentunya memiliki pemahaman akuntansi yang baik serta teknologi berupa SISKEUDES yang saat ini digunakan juga harus dikerjakan oleh perangkat desa yang berkompeten untuk mendukung kualitas laporan yang dihasilkan. Pengelolaan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES ini tentu diharapkan dapat memberi dampak positif sehingga dapat mendukung terciptanya pelaporan keuangan desa yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, dan Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sampang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam membangun desa. Upaya tersebut dimulai dengan skema penataan desa dengan memberikan berbagai fasilitas dimana diantaranya adalah adanya sistem dalam pengelolaan keuangan desa dengan maksud mempermudah dalam hal pengelolaan keuangan desa bagi para pihak yang terkait. Namun pada kenyataannya masih banyak kendala dalam hal penerapan sistem ini. Diantaranya adalah terkait sumber daya manusia yang memang kita ketahui bahwasannya sumber daya manusia di pemerintahan desa dapat dikatakan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sampang ?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sampang?
3. Apakah implementasi SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi SISKEUDEDES terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sampang.

1.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pengungkapan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, serta implementasi SISKEUDEDES terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sampang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan upaya lanjutan dalam mencoba melakukan penelitian dengan perbedaan indikator yang mempengaruhi dengan variabel kualitas laporan desa dengan fokus pada pemerintahan desa dimana penelitian ini belum banyak dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh beberapa indikator yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintahan desa yang dapat bermanfaat pada

perkembangan ilmu akuntansi sektor publik di Indonesia, terutama pada ranah pemerintahan desa yang rentan terhadap kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan praktik pengelolaan keuangan khususnya pada pemerintahan desa. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa (umumnya) dan para akuntan (khususnya) mengenai akuntansi sektor publik serta prospek dari profesi di bidang pemerintahan.